

GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN PEDESAAN DALAM KONFLIK LAHAN MELAWAN KORPORASI: STUDI KASUS KELOMPOK TANI SUNGAI LANDAI MANDIRI MELAWAN PT. WKS DI DESA LUBUK MANDARSAH

Siti Maidina Herdiyanti ¹⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

corresponding Author :

maidina1995@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas gerakan sosial perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS di Desa Lubuk Mandarsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik perseteruan yang diperankan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri kepada PT. WKS disebabkan oleh klaim lahan ulayat dari para perempuan dan ijin konsesi dari PT. WKS yang menyebabkan masyarakat tergusur dari perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan aksi kolektif yang solid dalam upaya merebut kembali lahan milik masyarakat. Implikasi teoritis *political contentious* melalui *collective action framing* relevan untuk memotret aksi konfrontasi dan pergerakan para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS.

Kata Kunci: gerakan perempuan, klaim lahan, politik perseteruan

Abstract

This study discusses the women's social movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri against PT. WKS in Lubuk Mandarsah Village. The results showed that the political contentious played by the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri against PT. WKS was caused by customary land claims from women and concession permits from PT. WKS which caused the community to be evicted from plantations and settlements resulting in several solid collective actions to reclaim land belonging to the community. The theoretical implications of political contentious through collective action framing are relevant for photographing the confrontational actions and movements of the women of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri against PT. WKS.

Keywords: Women's Movement, Land Claims, Political Contentious

PENDAHULUAN

Gerakan sosial yang berlangsung dari masa ke masa telah berhasil melibatkan berbagai kalangan untuk berkumpul dan membentuk *people power* (Manan, 2020). Di berbagai daerah Indonesia, ekistensi gerakan sosial perempuan telah mewarnai perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak ulayat, lahan pertanian dan perkebunan, serta rumah tinggal dari upaya penggusuran dan perampasan sepihak dari pemerintah maupun perusahaan. Di Sulawesi Selatan, para pekerja perempuan

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 23 Oktober 2023

Published: 31 Oktober 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



sawit dan perempuan pesisir berjuang mengakses sumberdaya mereka dengan cara tetap menanam berbagai komoditas pangan di lahan sengketa mereka dalam menghadapi perkebunan skala besar yang mengklaim lahan perkebunan mereka akibat dampak pembangunan pelabuhan Makassar (Suriyani, 2021). Di Kepulauan Aru, Maluku, perempuan adat Marafenfen gigih berjuang mempertahankan wilayah adat mereka seluas 689 hektar sebagai sumber kehidupan mereka dari penguasaan TNI Angkatan Laut sejak tahun 1991 (Nugraha dan Belsera, 2021). Di Jawa Tengah, para perempuan di wilayah pegunungan Kendeng Utara, Rembang ikut turut serta melakukan demonstrasi dalam mempertahankan kelestarian lingkungan mereka akibat pembangunan pabrik PT Semen Indonesia, bahkan diketahui sembilan perempuan Kendeng nekat mengecor kaki mereka dengan semen di depan Istana Merdeka pada tahun 2016 (BBC Indonesia, 2016).

Sejumlah gerakan sosial perempuan pedesaan di Indonesia diatas menunjukkan bahwa perempuan dalam gerakan sosial berperan aktif dalam perjuangan komunitasnya baik secara formal maupun informal demi merebut kembali hak atas tanah dan sumber daya alam di sekeliling lahan mereka (Nurdin et al., 2020). Ketimpangan penguasaan tanah bagi perempuan pedesaan disebabkan oleh kuasa eksklusif dan ketidakadilan gender. Menurut Hall et al. (2011), kuasa eksklusif dimaksudkan bahwa penyingkiran secara terstruktur sekelompok orang atas lahan atau tanah yang berlangsung melalui relasi kuasa seperti tekanan, regulasi, legitimasi dan pasar. Sedangkan, Fakih (1998) menyebutkan bahwa terdapat lima bentuk ketidakadilan yaitu stereotip atau pelabelan, beban kerja, marginalisasi atau peminggiran, kekerasan baik fisik maupun non fisik dan subordinasi (Ratnasari, 2018, p.3).

Merujuk data komunitas Solidaritas Perempuan dikutip oleh Kommas.go.id (2021), realitas perlawanan perempuan pedesaan melalui gerakan sosial telah menjadikan perempuan sebagai subjek atau aktor penggerak dalam penyelesaian konflik sengketa lahan, akan tetapi juga memicu praktik kekerasan dan ketidakadilan gender bagi perempuan berupa tindakan diskriminasi dalam hak akses atas informasi, dikecualikan dalam konsultasi dan pengambilan keputusan, tidak ada analisis gender terutama kerentanan perempuan dalam penyusunan dokumen terkait, serta perempuan lah yang menanggung lebih berat dan mendalam dari akibat konflik yang terjadi. Artinya, gerakan sosial perempuan merupakan suatu upaya perlawanan yang kompleks yang mempertaruhkan aspek materil dan non materil yang berdampak langsung bagi para perempuan.

Selanjutnya, gerakan sosial perempuan pedesaan memiliki karakteristik tersendiri di setiap daerah. Selain dipersatukan karena suatu isu dan tuntutan yang sama, mereka juga dipersatukan dengan nilai-nilai sosial budaya yang mempengaruhi bentuk aksi kolektif gerakan sosial perempuan sekaligus menjadi kekuatan dan simbol perlawanan perempuan pedesaan. Biasanya kepercayaan keagamaan dan adat istiadat seperti

kegiatan pengajian, upacara adat dan penjagaan alam menjadi identitas gerakan sosial perempuan pedesaan dalam memperebutkan hak atas tanah ulayat mereka. Adanya nilai-nilai khas yang bermuatan lokal membuat gerakan sosial perempuan pedesaan memiliki diferensiasi yang menarik dalam konteks resolusi konflik sengketa lahan dan pembangunan di suatu daerah.

Salah satu gerakan sosial perempuan pedesaan dalam konflik sengketa lahan yang melibatkan kelompok perempuan tampil sebagai simbol perjuangan masyarakat desa terjadi di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Gerakan sosial perempuan di Desa Lubuk Mandarsah dilatarbelakangi konflik agraria yang sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya dimana tanah ulayat mereka yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka untuk bertani dan berkebun diambil alih secara sepihak oleh korporasi besar di Jambi yaitu PT Wira Karya Sakti (WKS) yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HITI). Dalam kurun lima tahun terakhir, kelompok perempuan Desa Lubuk Mandarsah telah secara kolektif berada di garis depan untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dalam melawan pengusuran yang kerap mereka terima.

Telah banyak penelitian-penelitian terdahulu terkait gerakan sosial perempuan melawan korporasi dan pemerintah biasanya erat kaitannya dengan ketimpangan sumber daya ekonomi beserta hadirnya kebijakan pembangunan yang mengabaikan pemukiman atau perkampungan, lahan produktif hingga lingkungan di suatu wilayah (Hiplidudin 2019, Kartika 2014, Astuti dan Astaria 2020, Rahmi dan Putra 2020, Fitri dan Akbar 2017 dan Puspitasari 2017). Adapun persamaan sejumlah penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah mengenai analisis gerakan perempuan melawan pihak korporasi terkait sengketa lahan atau agraria yang melibatkan perempuan secara aktif baik sebagai tokoh di depan layar (berhadapan langsung dengan aparat dan pihak korporasi) maupun di belakang layar (terlibat aktif mempersiapkan gerakan). Dalam penelitian ini, kalangan perempuan tidak hanya menjadi korban dari konflik yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi, melainkan juga menjadi pelaku yang memiliki peran signifikan di depan layar maupun di belakang layar selama proses konflik berjalan. Sementara perbedaannya, penulis akan lebih berfokus pada aspek politik dalam gerakan sosial perempuan yang muncul untuk mengetahui sejauhmana konflik kepentingan dan aktor siapa saja yang berperan melahirkan gerakan sosial perempuan pedesaan di Provinsi Jambi dalam konflik pengusuran lahan melawan korporasi beserta strategi melalui aksi buka pakaian.

A. Contentious Politics

Teori *Contentious Politics* merupakan bagian dari teori gerakan sosial yang dikembangkan oleh Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam. *Contentious politics*, menurut Charles Tilly, adalah "the use of disruptive techniques to make a political point, or to change government policy" (penggunaan teknik-teknik disruptif dalam

upaya mengangkat sebuah sikap politik atau untuk mengubah kebijakan pemerintah). Teknik disruptif yang dimaksudkan adalah aksi-aksi yang mengganggu kegiatan normal dalam masyarakat seperti misalnya demonstrasi, pemogokan, riot, *civil disobedience*, terorisme, pemberontakan atau revolusi (Tilly 2008: 5). Teknik-teknik ini umum digunakan dalam gerakan sosial.

Menurut Tarrow (1998), aksi kolektif dalam *contentious politic* ialah apabila dipergunakan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses regular ke institusi-institusi, yang bertindak atas nama klaim-klaim baru atau yang tidak diterima atau yang bertindak dengan cara-cara yang secara fundamental mempertanyakan pihak lain atau otoritas. Sementara itu, menurut Goodin dan Tilly (2006), *contentious politic* berkembang ketika *gap* yang ada di antara realitas dan harapan tidak lagi dapat diterima. Aksi-aksi kolektif punya kekuatan karena mereka [berani] menantang pemegang kekuasaan, membangkitkan solidaritas, dan mereka mempunyai arti dalam kelompok masyarakat, situasi dan budaya nasional tertentu) (Tarrow 1998: 4). Singkatnya, dalam *contentious politic*, rakyat melakukan aksi-aksi mengkonfrontasi lawan, elit, atau pemegang otoritas atau penguasa.

teori *contentious politics* oleh Dough McAdam, Sydney Tarrow dan Charles Tilly menekankan tiga faktor penting, yaitu (1) struktur kesempatan politik dan kendala yang dihadapi gerakan; (2) bentuk-bentuk organisasi (informal maupun formal), tersedia untuk mengacau, dan (3) proses kolektif menafsirkan, memberi atribut, dan mengkonstruksi sosial yang menjembatani antara kesempatan (peluang) dan tindakan (aksi). Atau merujuk pada ketiga faktor dengan sebutan singkatan konvensional yaitu: kesempatan politik (*political opportunities*), struktur mobilisasi (*mobilization structures*), dan proses pbingkaiian (*framing processes*).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus pada gerakan perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi. Dalam studi ini peneliti akan menganalisa kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi lengkap menggunakan sejumlah prosedur pengumpulan data berdasarkan hal-hal yang terjadi gerakan perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri di Desa Lubuk Mandarsah. Kasus dibatasi dengan waktu dan aktivitas yang berhubungan dengan peristiwa tersebut (Creswell, 2016).

Jenis penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis ditujukan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan perempuan yang tersembunyi. Untuk itu, pendekatan kualitatif perspektif feminis digunakan untuk mendeskripsikan motif dan latar belakang para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang membentuk gerakan sosial dalam konflik lahan melawan PT. WKS beserta strategi gerakan yang dipilih. Penelitian ini akan menggunakan data

primer melalui wawancara dengan sejumlah informan dengan cara *face-to-face interview* (wawancara tatap muka) melalui pertanyaan semi struktur atau terbuka. Sementara penggunaan data sekunder dilakukan melalui informasi dari dokumen berupa dokumen publik dan hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam menganalisis data hasil wawancara.

Subjek dalam penelitian ini adalah para perempuan yang terlibat langsung dalam Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri beserta *stakeholders* yang berkaitan dan dianggap memahami keadaan dan situasi yang berlangsung di lapangan serta mampu memberikan informasi dan data yang dapat dianalisa lebih mendalam. Terdapat sebanyak 10 orang informan atau narasumber yang diwawancarai peneliti dengan berbagai sumber informasi, mulai dari anggota perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, LSM, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan warga setempat.

Terdapat empat tahap analisa data dalam penelitian ini. *Pertama*, reduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kedua, menyajikan secara naratif dan deskriptif dan menginterpretasikan hasil wawancara dengan menarasikan temuan dengan mengkontekstualisasikannya berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Ketiga, hasil keseluruhan data-data yang telah di analisa secara mendalam tersebut, kemudian disusun dengan baik sehingga dapat menjadi hasil dan temuan penelitian yang memadai untuk memberikan kesimpulan dan dapat digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kemunculan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri

Gerakan sosial perempuan di Desa Lubuk Mandarsah dimulai sejak tahun 2017 yang ditandai berdirinya Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, Anggota Serikat Tani Tebo (STT) yang diketuai oleh seorang petani perempuan, Nyai Jusma atau kerap disapa Nyai Jusma. Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri adalah satu-satunya kelompok tani yang anggotanya meliputi laki-laki dan perempuan namun diketuai oleh perempuan. Hal ini dijelaskan oleh Fransdodi selaku aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Jambi, kehadiran dan partisipasi perempuan menandakan adanya perubahan pola gerakan yang diharapkan dapat meningkatkan perempuan dalam bidang politik komunitas yang selama ini dikuasai oleh kalangan laki-laki (Wawancara dengan Fransdodi, Kota Jambi, tanggal 24 Agustus 2022).

Sebelumnya, sejak tahun 2006 ketika konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah ini dimulai, semua kelompok tani di Desa Lubuk Mandarsah diketuai oleh laki-laki. KPA selaku organisasi sipil tingkat nasional yang mendampingi petani di Tebo sejak 2010 dalam konflik lahan dengan PT. WKS melihat adanya kelemahan pada organisasi yang diketuai dan digerakkan sepenuhnya oleh kalangan laki-laki. Kelemahan itu misalnya, kalangan laki-laki lebih rentan terhadap tawaran transaksional yang kerap terjadi di lapangan sehingga tujuan gerakan tidak dapat diraih bersama. Selain itu, dalam aksi

perlawanannya melawan PT. WKS (ketika berdemonstrasi), para laki-laki kerap rentan bentrok dengan pihak perusahaan sehingga menyebabkan kerusakan bahkan kekerasan yang dialami masyarakat. Tak jarang pula, aksi gerakan yang didominasi laki-laki di Desa Lubuk Mandarsah menjadi rentan dikriminalisasi sepihak oleh pihak perusahaan. Adapula rasa keputusaasan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya perempuan akibat aksi gerakan laki-laki selama ini tidak menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan harapan mereka karena sebagian besar lahan yang diperjuangkan belum didapatkan mereka secara penuh. Maka dari itu, Fransdodi, selaku aktivis KPA yang mendampingi konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah menawarkan perubahan pola kepemimpinan dan gerakan di Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yaitu dengan mendorong Nyai Jusma untuk menjadi ketua kelompok.

Pada saat Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dibentuk pertama kalinya, telah ada beberapa kelompok tani yang secara organisasi tidak mengalami kemajuan pergerakan. Oleh sebab itu, banyak anggota dari kelompok tani lain yang berpindah ke Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri. Selain kebuntuan gerakan, faktor lainnya yang menyebabkan petani berpindah ke Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri adalah visi gerakannya yang menolak kemitraan dan tetap menuntut lahan. Disamping itu, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri ini memang banyak didominasi oleh penduduk awal Dusun Sungai Landai dan Desa Lubuk Mandarsah, bukan pendatang dari berbagai daerah. Namun, karena klaim lahannya yang tumpang tindih dengan kelompok lain, kehadiran kelompok ini dianggap sebagai gangguan bagi kelompok lain.

Oleh sebab itu, untuk mendapat pengakuan dari masyarakat terkait keseriusan kelompoknya dalam memperjuangkan hak-hak kelompok, Nyai Jusma mengajak rekan-rekannya untuk memindahkan rumah di lahan yang dipersengketakan. Selain itu, Nyai Jusma juga aktif mengajak seluruh anggota kelompok untuk berdemonstrasi menuntut hak mereka. Hal ini rutin mereka lakukan setiap memperingati Hari Tani di Provinsi Jambi. Dengan bantuan jejaring lembaga sipil di Provinsi Jambi, Nyai Jusma memobilisasi massa dari kelompoknya ke Kota Jambi untuk berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi. Lambat laun eksistensi mereka di masyarakat diakui, meskipun secara legalitas, kelompok ini belum diakui oleh pemerintah desa maupun perusahaan karena berkas legal formalnya belum selesai diurus (Wawancara dengan Zubaidah, Kota Jambi, tanggal 24 Agustus 2022).

Sejak terbentuknya Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri di Desa Lubuk Mandarsah pada tahun 2017, maka dinamika perlawanan dan perjuangan masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah pada tahun 2017-2022 secara khusus didominasi dan dipelopori oleh gerakan perempuan melalui Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri. Hal ini dilatarbelakangi pula karena hingga sampai saat ini tidak ada lagi kelompok tani yang baru didirikan dan aktif melakukan perlawanan dan perjuangan terhadap PT. WKS.

Adapun politik persetujuan yang dipelopori oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri terjadi pada bulan Juni 2018 ketika PT.WKS melakukan verifikasi untuk kelompok tani yang akan mengikuti kemitraan dengan PT WKS. Adapun kelompok tani yang diakomodir adalah Kelompok Tani Ketalo Jaya dan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri. Namun, pola kemitraan ini sampai tahun 2020 belum dijalankan dan dituangkan dalam bentuk SK Nota Kesepakatan Kemitraan. Hal ini terjadi karena Kelompok Tani Ketalo Jaya menerima pola kemitraan dari PT. WKS tanpa klaim lahan, sedangkan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri menolak pola kemitraan dari PT WKS dan tetap mengklaim lahan yang dimiliki. Sementara PT. WKS tidak menghendaki adanya pola kemitraan jika kelompok tani tetap mengklaim lahan. Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri sendiri menolak pola kemitraan dari PT. WKS karena mereka menyakini bahwa lahan sengketa yang di Dusun Sungai Landai merupakan hak milik mereka. Selanjutnya, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri nekat menanam kembali di lahan yang diklaim dengan PT. WKS, bahkan Ketua Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, Nyai Jusma dan sebagian anggota kelompoknya memindahkan rumah mereka ke areal lahan yang di klaim. Menurut PT. WKS, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri menanam secara illegal di lahan mereka. Namun, menurut Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri lahan tersebut adalah milik mereka sejak lama (Wawancara dengan Zubaidah, Kota Jambi, tanggal 24 Agustus 2022).

Pada tahun 2019, petani di Desa Lubuk Mandarsah dari Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dapat melakukan panen raya di lokasi konflik tersebut. Hal ini terjadi karena sejak 2017 mereka kembali menanam di lahan tersebut meskipun perusahaan belum mengakui hak Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri atas lahan tersebut. Menurut, Maswan, salah satu anggota Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, para petani berhasil melakukan panen raya dan memperoleh hampir 1,200 kilo gram gabah kering untuk sumber penghidupan mereka, meskipun jumlah panen tersebut tidak sebanyak panen raya mereka di tahun-tahun sebelumnya (Diana, 2020). Panen raya ini bisa terjadi karena Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri menolak pola kemitraan yang ditawarkan oleh PT. WKS, sementara kelompok tani lainnya seperti Kelompok Tani Ketalo Jaya tidak dapat melakukan panen raya karena telah menerima pola kemitraan yang ditawarkan PT. WKS berupa pengadaan ternak kerbau, kambing, dan ternak lebah madu.

B. Tuntutan Kelompok Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri

Adapun tuntutan gerakan perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang diketuai oleh petani perempuan, Nyai Jusma ialah kepemilikan hak atas lahannya. Nyai Jusma menyatakan bahwa lahan garapan milik Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri sepenuhnya merupakan hak milik mereka yang telah dikelola secara turun-menurun. Tuntutan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri tersebut ditegaskan dengan

penolakan atas program kemitraan yang ditawarkan oleh PT. WKS di lahan garapan mereka. Bagi Nyai Jusma dan anggota Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri lainnya, sejak dahulu mereka sudah hidup dan makan sehari-hari dari lahan atau tanah yang mereka tinggal dan tanam sendiri dengan tradisinya dan bukan dari lahan dan cara menanam dari hasil kemitraan yang diatur oleh pihak perusahaan.

“Saya hanya ingin tanah bukan kemitraan. Kami makan dari yang kami tanam di tanah sendiri. Bukan hasil padi bermitra dengan kalian. Perusahaan selalu minta mitra, kami hanya mau tanah untuk hidup (Diana, Arumingtyas, 2022).

Tuntutan atas lahan tersebut menunjukkan pula adanya hubungan keberadaan sosok perempuan di tengah lingkungan hidupnya dan faktor budaya para perempuan sebagai penjaga tradisi di tengah keluarga dan masyarakat. Bagi mereka, tanah merupakan sumber kehidupan dirinya dan keluarga. Untuk melanjutkan kehidupan, para perempuan tegas akan bertahan di tanahnya sendiri. Meski tujuan besar Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dapat dinilai secara materil karena menuntut hak kepemilikan lahan, namun sejatinya tuntutan dan dorongan eksistensi para perempuan di garda terdepan dalam Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri ini ialah untuk menjaga warisan tradisi mereka dalam merawat keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, Nyai Jusma bersama anggota perempuan lainnya dalam dinamika gerakan sosialnya selama lima tahun terakhir tidak gentar dengan berbagai macam tawaran program kemitraan atau kompensasi, intimidasi dan perlawanan balik pihak perusahaan terhadap mereka.

C. Ragam Aksi Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat sejumlah aktivitas dan aksi yang dilakukan oleh gerakan perempuan Kelompok Tani Sungai Mandiri melawan PT. WKS dalam konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah, antara lain:

1. Melakukan Konsultasi dengan LSM

Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri aktif melakukan konsultasi dengan berbagai organisasi sipil di Jambi khususnya dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Walhi Jambi. Konsultasi yang dilakukan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dengan KPA wilayah Jambi meliputi pendampingan organisasi, pengembangan kapasitas anggota, perekrutan anggota dan lain-lain. Ruang konsultasi bersama KPA menjadi medium pengembangan SDM para perempuan untuk dapat meningkatkan kesadaran atas hak-hak perempuan baik dalam kehidupan sosial masyarakat, politik, termasuk hak-hak perempuan di bidang ekonomi dan hukum khususnya menyangkut tuntutan para perempuan atas hak milik lahan perkebunan dan pemukiman mereka. Sementara, konsultasi Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dengan Walhi Jambi berkaitan dengan pengorganisasian jejaring gerakan petani lintas daerah atau provinsi guna membangun kesadaran publik atas tuntutan yang diperjuangkan oleh para

perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri kepada publik. Ruang konsultasi bersama Walhi Jambi menjadi medium pendistribusian berita atas segala bentuk aksi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri baik media cetak maupun media elektronik (Wawancara dengan Amin, Kota Jambi, tanggal 23 Agustus 2022). Selain itu, aktivitas konsultasi Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dengan LSM biasanya ditindaklanjuti dengan praktik langsung di lapangan. KPA dan Walhi Jambi memfasilitasi ruang publik kepada para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri sebagai medium unjuk rasa seperti pada setiap perayaan Hari Tani Nasional sehingga pembekalan kemampuan dan kapasitas para perempuan dalam mengorganisasi massa dapat terlatih dengan baik.

2. Melakukan Pertemuan Reguler

Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri memiliki jadwal pertemuan antar anggota yang berlangsung secara reguler dan secara insidental. Pertemuan reguler biasanya terjadi berdasarkan momentum tertentu, misalnya pada Hari Tani Nasional. Beberapa bulan sebelum peringatan Hari Tani Nasional dilaksanakan, para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri ikut serta merencanakan gerakan dan tuntutan apa yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu atau dua bulan sebelumnya. Pada saat persiapan tersebut, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri akan rutin melakukan rapat dan konsolidasi guna menghasilkan suatu aksi demonstrasi yang terorganisir dan terukur. Sementara, pertemuan yang bersifat insidental biasanya terjadi apabila para perempuan menghadapi masalah di lapangan yang harus direspons secara cepat seperti penggusuran lahan oleh PT. WKS. Apabila terjadi hal semacam itu, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri akan secara cepat merespon dan mengumpulkan massa untuk menentukan langkah antisipasi yang harus diambil menghadapi penggusuran oleh PT. WKS (Wawancara dengan Zubaidah, Kota Jambi, tanggal 24 Agustus 2022).

3. Menanam Kembali di Lahan yang Diklaim

Sejak berdirinya kelompok tani mereka pada tahun 2017, para perempuan yang tergabung dalam Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melakukan perlawanan yang kongkrit di lapangan dengan mereka menanam kembali aktivitas bertani di lahan yang mereka klaim. Adapun tanamannya adalah padi untuk tanaman pangan, sayur mayur (palawija) sebagai tanaman dapur, buah-buahan seperti pisang dan kelapa sawit sebagai sumber mata pencaharian mereka dan keluarga seperti biasanya. Tercatat upaya ini membuahkan hasil Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dapat mengadakan panen raya padi di lahan tersebut sebanyak tiga kali yakni tahun 2018, 2019 dan 2020. Tujuan para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri menanam kembali di lahan yang diklaim dapat dibedakan menjadi dua yakni tujuan praktis dan tujuan strategis. Adapun tujuan praktisnya ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghasilan para perempuan dan

keluarganya dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang. Sementara, tujuan strategisnya bagi Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri ialah untuk memperkuat klaim atas lahan yang dipersengketakan. Jika mereka tidak menanam di lahan tersebut, mereka berasumsi bahwa hal tersebut akan membuat mereka tidak memiliki nilai tawar di hadapan perusahaan maupun di hadapan hukum. Karena, PT. WKS masih berusaha untuk menawarkan pola kemitraan kepada semua petani di Desa Lubuk Mandarsah guna mendapatkan akses lahan secara penuh dari masyarakat (Wawancara dengan Amin, Kota Jambi, tanggal 23 Agustus 2022).

4. Demonstrasi

Sejak berdiri pada tahun 2017 sampai tahun 2020, para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri telah terlibat dalam aksi demonstrasi sebanyak 3 kali, yaitu pada peringatan Hari Tani Nasional pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Aksi demonstrasi ini biasanya dilakukan di depan kantor Gubernur Jambi dan kantor DPRD Provinsi Jambi. Tak jarang dalam aksi demonstrasi ini, para perempuan yang paling lantang menyuarakan tuntutan mereka dan memimpin orasi dihadapan para petani laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa para perempuan yang tergabung dalam Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri bukanlah sebagai objek gerakan sosial yang pasif, melainkan para perempuan ini ialah subjek yang memerankan sebuah gerakan perlawanan yang aktif di hadapan PT. WKS dan publik. Selain itu, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri juga ikut berpartisipasi demonstrasi pada peringatan Hari Buruh. Namun pada peringatan Hari Buruh, anggota Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri hanya terlibat sebagai sukarelawan sebagai bentuk solidaritas antara sesama pekerja. Adapun aksi demonstrasi lainnya dilakukan secara dalam kesempatan insidental seperti berdemo untuk menghentikan alat berat yang sedang menggusur lahan petani, menghentikan aktivitas penanaman yang sedang dilakukan oleh pekerja PT. WKS, mendatangi Polsek setempat untuk memberikan dukungan pada rekan mereka yang sedang ditahan atau berperkar hukum terkait konflik lahan PT. WKS.

5. Demonstrasi Melalui Aksi Buka Pakaian

Pada tanggal bulan September tahun 2020, PT. WKS kembali menjalankan aktivitas operasionalnya yakni melakukan *land clearing* dengan menurunkan alat berat ekskavator ke areal lahan yang telah ditanami masyarakat khususnya Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri selama lebih dari 2 tahun. Beberapa anggota Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri terutama para perempuan yang berada dilokasi tersebut berusaha menghalangi dan bernegosiasi dengan operator alat berat PT. WKS yang bertugas, akan tetapi alat berat tersebut terus bekerja dan tetap merangsek ke lahan mereka. Melihat hal tersebut, secara spontan Ketua Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, Nyai Jusma dan lima orang rekan perempuannya membuka pakaian yang dikenainya sehingga hanya tertinggal

celana pendek dan pakaian dalam (Diana, 2020). Dengan kondisi tanpa pakaian, para perempuan ini nekat langsung menduduki alat berat ekskavator PT. WKS yang masih melakukan *land clearing* sambil berteriak menuntut aktivitas *land clearing* perusahaan dihentikan. Aksi ini merupakan aksi demonstrasi berlangsung secara emosional dan secara spontan diikuti oleh sekitar 45 perempuan lainnya dari Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri (Kompas, 2020). Dengan adanya penghadangan dari 45 orang perempuan sambil membuka pakaiannya pada akhirnya membuat petugas alat berat ekskavator PT. WKS terpaksa menghentikan aktivitasnya. PT.WKS sendiri juga langsung menghubungi aparat desa dan aparat keamanan setempat menjelaskan bahwa telah terjadi konflik di lokasi *land clearing* dan meminta aparat desa dan aparat kepolisian setempat untuk membujuk kalangan perempuan untuk berhenti melakukan aksinya. Di lapangan terjadi perseteruan dan kericuhan yang alot, para perempuan berusaha menghalangi sambil berteriak, marah-marah dan menangis sehingga membuat PT. WKS memilih mundur dan membuka ruang negoisasi. Aksi buka pakaian yang diikuti oleh 45 orang petani perempuan ini menggegerkan masyarakat sekitar dan berhasil mencuri perhatian publik melalui massifnya pemberitaan media terkait aksi ini. Para perempuan mengaku aksi membuka pakaian tersebut terjadi begitu saja secara tidak sadar. Para perempuan tidak sempat memikirkan rasa malu terhadap tubuhnya tanpa pakaian dihadapan publik demi mempertahankan lahan perkebunannya sebagai sumber penghidupan mereka (wawancara dengan Nyai Rahma, Desa Lubuk Mandarsah, tanggal 22 Agustus 2022). Pasca aksi demonstrasi buka pakaian oleh para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri ini, pihak pemerintah setempat mendapat desakan dari publik dalam upaya penyelesaian konflik lahan yang berkeadilan khususnya untuk melindungi para perempuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama KPA, aksi buka pakaian para perempuan berhasil membuat pemerintah provinsi yakni Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terlibat merespon permasalahan ini dengan mempertemukan PT. WKS dengan masyarakat. PT. WKS yang diwakili Subono dan Setiadi, serta Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang diwakili Maswan dan Nyai Jusma sepakat merumuskan sejumlah kesepakatan baru, yaitu, pertama, PT. WKS harus menghentikan aktivitas penggusuran di lahan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dan tidak lagi melakukan upaya intimidasi apapun kepada masyarakat. Kedua, PT. WKS akan mengembalikan lahan milik Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang sudah digusur dan diambil alih oleh perusahaan. Ketiga, PT. WKS meminta Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri atau masyarakat tidak membuka lahan baru untuk bertani atau berkebun di kawasan ijin konsesi perusahaan (Diana, 2020). Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa aksi demonstrasi dengan membuka pakaian oleh para perempuan berhasil menjadi strategi yang

efektif untuk mencari solusi terbaik antara masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah dan PT. WKS tanpa kekerasan atau kontak fisik.

6. Menempati Lahan yang Diklaim

Aksi lainnya dilakukan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri ialah menempati lahan yang diklaim sejak tahun 2019. Langkah ini dipelopori oleh Ketua Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, Nyai Jusmawati yang mengajak beberapa anggota kelompoknya (sekitar 7-10 orang) untuk memindahkan rumahnya dan tinggal menetap di lahan yang diklaim. Hal ini dilakukan guna memudahkan mereka (para petani perempuan) untuk merawat tumbuhan yang mereka tanam di lahan mereka sebagaimana sebelumnya. Keputusan ini juga didasari atas adanya kesadaran para perempuan untuk mempertahankan lahan yang ditinggali. Dengan tinggal menetap di lokasi lahan yang diklaim membuat mereka menjadi lebih mudah dan lebih cepat memastikan dan memperoleh informasi yang terjadi di lahan mereka sehingga dengan begitu Nyai Jusma dapat segera menghubungi anggota kelompok yang lain jika terjadi intimidasi maupun konflik yang lebih luas dari PT. WKS. Fransdodi, selaku aktivis KPA wilayah Jambi menerangkan langkah Nyai Jusma yang memobilisasi sejumlah anggotanya untuk kembali menetap di lahan yang berkonflik merupakan salah satu strategi yang tepat sebagai *standing position* yang jelas dan kuat terkait kebutuhan untuk mempertahankan lahannya (wawancara dengan Fransdodi, Kota Jambi, tanggal 25 Agustus 2022).

D. Aktor Yang Terlibat Dalam Gerakan PerempuanKelompok Tani Sungai Landai Mandiri

Konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah antara kelompok perempuan melalui Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melibatkan sejumlah aktor. Hal ini karena konflik telah berlangsung dalam waktu yang lama dan menarik banyak pihak untuk terlibat dan memainkan perannya masing-masing, yaitu:

1. Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri

Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri merupakan kelompok tani yang beranggotakan mayoritas petani perempuan dan dipimpin oleh ketua kelompok tani perempuan sebagai aktor kunci dalam penelitian ini. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri didirikan pada tahun 2017 atas dorongan dan pengorganisasian dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jambi. Meskipun didirikan pada tahun 2017, yaitu 11 tahun dari awal mula konflik lahan PT. WKS bergulir di Desa Lubuk Mandarsah, namun anggota kelompok tani ini adalah masyarakat lokal yang merasa memiliki hak historis atas lahan yang dipersengketakan (klaim). Anggota Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri juga merupakan mantan anggota dari kelompok tani lainnya yang tidak menyepakati pola kemitraan yang ditawarkan oleh PT. WKS.

Pada saat ini, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dipimpin oleh petani perempuan Jusmawati, atau kerap disapa Nyai Jusma. Nyai Jusma merupakan warga Dusun Sungai Landai, Desa Lubuk Mandarsah. Pemilihan Nyai Jusma sebagai ketua didasari atas kesepakatan kelompok dan pemahaman bersama bahwa perempuan perlu mengambil peran lebih besar untuk mempertahankan lahan dalam menghadapi konflik lahan melawan PT. WKS. Selain itu, Nyai Jusma dipilih karena faktor ketokohan dan usianya sehingga Nyai Jusma dianggap dapat menyatukan berbagai kepentingan di dalam kelompok tani khususnya yang tinggal di Dusun Sungai Landai, Desa Lubuk Mandarsah.

Ketua KPA wilayah Jambi, Fransdodi menjelaskan bahwa meski Nyai Jusma secara ilmu dalam pegerakan barangkali belum mumpuni untuk melakukan gerakan yang sistematis dan terukur, bahkan minim pengalaman dan latar belakang pendidikannya, namun Nyai Jusma dianggap memiliki ketokohan dan kepemimpinan yang kuat (wawancara dengan Fransdodi, Kota Jambi, tanggal 25 Agustus 2022). Hingga saat ini, ketokohan dan keberadaan Nyai Jusma sebagai pemimpin di Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dinilai mampu untuk mempersatukan kepentingan-kepentingan yang ada diantara anggota khususnya membangun rasa solidaritas antar petani perempuan.

Dalam setiap aksi penolakan maupun demonstrasi yang diikuti oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri baik ditingkat desa maupun Provinsi Jambi, Ketua Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, Nyai Jusma selalu berada di garda depan dan memimpin langsung orasi secara terbuka terkait perjuangan klaim lahan masyarakat Desa Lubuk Mandarsah. Kehadiran sosok petani perempuan di tengah dinamika konflik lahan di Kabupaten Tebo ini sebelumnya tidak pernah terjadi karena berbagai aksi dan perjuangan masyarakat terkait sengketa lahan selalu didominasi oleh laki-laki .

Selanjutnya, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri beranggotakan 115 orang dan lahan yang diklaim oleh kelompok tani ini seluas 395 hektar berada di lahan yang diklaim dan dimitrakan oleh PT. WKS seluas lebih dari 2000 hektar. Adapun klaim lahan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri di Desa Lubuk Mandarsah bukan merupakan klaim lahan perorangan, namun merupakan klaim lahan secara kolektif dimana masyarakat secara umum sudah tergabung dalam beberapa kelompok tani lainnya, seperti Serikat Tani Tebo, Kelompok Tani Sekato Jaya, Kelompok Tani Ketalo Jaya, Kelompok Tani Alam Lestari, Kelompok Tani Sungai Landai Bersatu dan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri. Sementara, adapun sejumlah nama petani perempuan lainnya yang diketahui aktif dalam dalam sejumlah aksi penolakan penggusuran dan aksi demonstrasi terhadap PT. WKS dari Kelompok Tani SLM adalah Rahma, Nurnis, Halma dan Mariani (Diana dan Arumingtyas, 2022).

Hadirnya Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang dipimpin oleh Nyai Jusma menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan secara proaktif dalam dinamika gerakan sosial di Desa Lubuk Mandarsah. Salah satu indikatornya ialah adanya peningkatan jumlah anggota dari kalangan perempuan daripada anggota laki-

laki. Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri sejak awal berdiri diketahui pula secara proaktif berjejaring dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jambi guna memperkuat advokasi dan legitimasi atas lahan yang diperjuangkan kepada pihak perusahaan PT.WKS.

2. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jambi

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merupakan organisasi non-pemerintah (Non Government Organization) tingkat nasional memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan perwujudan Pembaruan Agraria Sejati (*Genuine Agrarian Reform*) di Indonesia, termasuk salah satunya di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo. KPA wilayah Jambi telah mendampingi petani di Desa Lubuk Mandarsah sejak tahun 2007. Momentumnya adalah setelah terjadi pembakaran alat berat milik PT. WKS yang dilakukan masyarakat pada bulan Desember 2007. Paska kejadian tersebut, banyak petani yang terlibat mengalami permasalahan hukum hingga pemenjaraan. Hal ini membuat konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah mengemuka dan diketahui oleh kalangan organisasi sipil di Provinsi Jambi (wawancara dengan Fransdodi, Kota Jambi, tanggal 25 Agustus 2022).

Sebagai NGO yang secara khusus bergerak untuk mendorong pembaruan agraria, KPA merasa terpenggil untuk mendampingi petani di Desa Lubuk Mandarsah yang belum mendapat akses pada jejaring organisasi sipil di luar. Disisi lain, menurut pengamatan KPA, masalah konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah bukanlah satu-satunya konflik lahan yang terjadi antara masyarakat desa dengan PT. WKS di Provinsi Jambi. Ada beberapa konflik lain di wilayah jambi lainnya yang juga telah terjadi sebelumnya. Kenyataan ini membuat KPA harus turun tangan untuk membantu petani di Desa Lubuk Mandarsah dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Selama mendampingi masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah, KPA aktif melakukan advokasi/pembelaan kepada masyarakat khususnya kepada para perempuan di Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri. Advokasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya memberikan pelatihan organisasi bagi anggota kelompok tani agar petani dapat memperjuangkan hak mereka secara sistematis. Selain itu, KPA juga membantu Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri untuk membangun jejaring sosial mereka dengan mempertemukan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dengan para pihak yang dapat membantu, misalnya antar organisasi petani lintas daerah, NGO yang berhubungan, tokoh politik, media, dan lain-lain. Pada peringatan Hari Tani Nasional misalnya, KPA membantu Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri untuk memperoleh tempat singgahselama melakukan demonstrasi di Kota Jambi (wawancara dengan Amin, Kota Jambi, tanggal 25 Agustus 2022).

Dalam kegiatan pendampingan terhadap Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, KPA membantu para anggota Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi, misalnya untuk memahai tat tertib administrasi,

tata cara rapat dan memberikan masukan-masukan yang diperlukan terkait berbagai masalah yang dihadapi oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri khususnya hak-hak perempuan dan lahan.

Salah satu pencapaian yang dihasilkan oleh KPA ialah mendorong petani perempuan Nyai Jusma sebagai ketua Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dalam hal pengorganisasian massa secara efektif yang memiliki dampak terhadap keseimbangan dalam gerakan petani di Desa Lubuk Mandarsah bahkan di Provinsi Jambi atas konflik lahan melawan PT. WKS.

3. Walhi Jambi

Walhi Jambi merupakan organisasi lingkungan yang berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia dan hak lingkungan hidup. Walhi Jambi hadir melakukan pendampingan dan advokasi secara aktif di Desa Lubuk Mandarsah sejak tahun 2007 ketika terjadi aksi pembakaran alat berat milik PT. WKS yang mengakibatkan sejumlah masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah dikriminalisasi. Dari kejadian itu, Walhi Jambi mengorganisasikan berbagai NGO yang bernaung dibawahnya dan NGO lainnya yang menjadi jejaring Walhi Jambi untuk memberikan perhatian terhadap konflik lahan yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah.

Dalam advokasinya di Desa Lubuk Mandarsah, Walhi Jambi biasanya bertindak sebagai fasilitator antar organisasi. Walhi Jambi tidak hadir secara langsung mendampingi petani di lokasi, namun memberikan fasilitas bagi petani untuk melakukan gerakan misalnya melalui jejaring organisasi, jejaring media dan lain-lain. Salah satu peran penting Walhi Jambi bagi Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri ialah turut tekanan-tekanan sosial politik melalui siaran pers dan laporan kajian lingkungannya atas tuntutan dan konflik yang bergulir di Desa Lubuk Mandarsah. Walhi Jambi bersama jejaring organisasi sipil di tingkat lokal maupun nasional seperti Komnas HAM dan internasional seperti Green Peace berhasil menintervensi PT. WKS di pasar internasional sehingga jejaring bisnis PT. WKS melakukan pembatasan pembelian produk dari APP (Asian Pulp and Paper) Sinar Mas yang menaungi PT. WKS. Tekanan ini membuat PT. WKS harus mengubah cara pendekatannya di lapangan dan harus menindak secara hukum karyawannya yang melakukan penggalan hukum dan HAM terhadap petani di Desa Lubuk Mandarsah (wawancara dengan Abdullah, Kota Jambi, tanggal 27 Agustus 2022).

4. Media

Media massa dan media elektronik memiliki peranan sangat penting dalam menyampaikan informasi dan berita mengenai konflik lahan yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah. Beberapa kejadian besar seperti pembakaran alat berat, kematian Indra Pelani dan Aksi Buka Pakaian dapat diketahui secara luas atas adanya pemberitaan dan publikasi dari berbagai media. Adanya sejumlah peristiwa dan aksi

demonstrasi yang diberitakan oleh media menimbulkan efek domino dan kesadaran masyarakat luas terkait apa yang sebenarnya terjadi di Desa Lubuk Mandarsah.

Berbagai tuntutan dan aksi dari Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri terhadap PT. WKS berhasil menjadi perbincangan publik dan dibahas dalam berbagai forum sipil sehingga membangun simpati publik untuk menuntut adanya perbaikan dalam tata kelola agrarian di Desa Lubuk Mandarsah dan di Provinsi Jambi. Hal ini juga membuat para petani di Desa Lubuk Mandarsah sangat terbantu dan tidak sendirian dalam memperjuangkan haknya. Disisi lain, pemberitaan yang berhasil dipublikasikan oleh media membuat ruang gerak PT. WKS terbatas dan tidak bisa melakukan kehendaknya secara semena-mena dan melanggar hukum kepada masyarakat (wawancara dengan Amin, Kota Jambi, tanggal 25 Agustus 2022).

SIMPULAN

Konflik lahan di Desa Lubuk Mandarsah dimulai sejak munculnya ijin konsesi pada tahun 2006 yang mengakibatkan lahan perkebunan dan pemukiman masyarakat tergusur, khususnya gerakan perempuan dimulai sejak tahun 2017 dengan diberdirinya Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang diketuai oleh petani perempuan, Nyai Jusma. Kehadiran sosok perempuan Nyai Jusma berhasil melahirkan partisipasi petani perempuan lainnya untuk terlibat dalam pergerakan perlawanan terhadap PT. WKS secara solid dan terstruktur. Dalam setiap aksi perlawanannya, Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri juga berhasil memobilisasi puluhan petani perempuan berada di garda depan dalam upaya mempertahankan lahan perkebunan dan pemukiman mereka dari penggusuran yang dilakukan oleh PT. WKS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik perseteruan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri dilakukan oleh petani perempuan melalui konfortasi seperti aksi demonstrasi kepada pihak perusahaan dan pemerintah, nekat menanam kembali sekaligus menempati lahan mereka yang sudah dikuasai oleh perusahaan dan aksi demonstrasi dengan membuka pakaian ketika PT. WKS melakukan *land clearing* dengan alat berat diatas lahan mereka. Salah satu upaya perseteruan yang berdampak positif ialah demonstrasi melalui aksi buka pakaian karena melalui aksi spontan tersebut berhasil melahirkan sejumlah kesepakatan yang memihak kepada masyarakat untuk kembali bisa menanam di lahan mereka meskipun tidak memiliki kekuatan hukum. Namun setidaknya sejak terjadi demonstrasi melalui aksi buka pakaian pada tahun 2020 tersebut sampai saat ini, dinamika perlawanan perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS masuk dalam fase damai atau minim konflik.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan teori *political contentious* melalui *collective action framing* relevan untuk memotret dinamika gerakan perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS. Dua alasan utamanya yaitu, pertama, terdapat klaim dan konfortasi yang terjadi antara para perempuan dan pihak perusahaan terhadap lahan ulayat dan ijin konsesi di Desa Lubuk Mandarsah. Dalam

hal ini, perempuan tegas menolak pola kemitraan yang ditawarkan PT. WKS. Kedua, adapun proses pembentukan identitas dan aksi kolektif yang dilakukan oleh para perempuan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri disebabkan karena rasa kekecewaan yang dirasakan oleh perempuan akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT. WKS telah merampas penghidupan dan pendapat mereka, termasuk mengancam keluarga mereka sehingga melahirkan kesadaran kolektif untuk membangun perseteruan politik dan memobilisasi massa perempuan secara solid dalam setiap aksi perlawanannya terhadap PT. WKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abonga, Francis. (2019). *Naked Bodies and Collective Action: Repertoires of Protest in Uganda's Militarised, Authoritarian Regime*. Civil Wars. Vol. 22
- Afandi, Abdullah Khozin. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 01 (2011): 02.
- Ayub. (2015). *Melawan Eksploitasi Tubuh Antara Feminisme Barat dan Islam*. MUWAZAH. Volume 7. No 1.
- Bae, M. S. (2011). Interrogating Gil Power: Girlhood, Popular Media, and Postfeminism. In *Visual Arts Research* Vol.37, No.2. Illinois: University of Illinois Press.
- Benedicta, G. D. (2011). *Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negoisasi atas Tubuh*. *Jurnal Sosiologi*. Vol. 16, No 2.
- Faizan, Khoirul. *Mengintip Feminisme dan Gerakan Perempuan*. Jember: STAIN.
- Fallon, M. Kathleen. (2016). *Revisiting Repertoire Transition: Women's Nakedness as Potent Protest in Nigerian and Kenya*. *Mobilization*. Brook University
- Ghaniy. N. P. (2015). *Politik Tubuh Perempuan dalam Media*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hardiyanta, Sunu. 1997. *Michael Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKIS
- Himmatu. Annisa. *Kepemilikan Tubuh Individu Di Dalam Relasi Kuasa dan Sosial*, Universitas Indonesia
- Manan, P. R. (2020). People Power Dalam Sukseksi Kepemimpinan Di Mesir. *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 73–92.
- Misri. Deepti. (2011). "Are You A Man?": *Performing Naked Protest in India*. *Chicago Journals*. Vol. 36. No 3
- Nur Aini, Fennia.(2019). You're the feminist type? Hell yeah, I am!.UNS: SEMANTIKS
- Nurdin, A., Chaidar, A., Nazaruddin, T., & Puteh, A. A. (2020). *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*. Madani Press.
- Pabyantara. Dias. (9). *Gerakan Femen di Ukraina dalam Kritik Posmodern Feminisme Terhadap Posfeminisme*. *Global & Strategis*. No 2.
- Prabasmoro, A. P. *Feminisme sebagai Tubuh, Pemikiran dan Pengalaman*

- Rallonza, Ma. Lourdes Veneracion. 2014. Women's Naked Body Protests And The Performance Of Resistance: Femen And Meira Paibi Protests Against Rape. *Philippine Political Science Journal*.
- Santoso. W. M. (2010). *Identitas, Politik Tubuh Perempuan dan Media Televisi*. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol V. No 1.
- Saptandari, Pinky. 2013. "Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi." *Biokultural 2* (No.1): 53-71.
- Shevchenko, Aleksandra. 2013. Femen is The New Feminism [online] diakses pada 4 April 2021.
- Shevchenko, Inna. 2015. We Are Femen, The Naked Shock Troops Of Feminism [online] diakses pada 4 April 2021.
- Sundari. Akhiriyati. (2017). *Rezim Seksualitas dan Agama Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam*. Jurnal Al-Maiyyah. Volume 10. No 2.
- Susilo. D. & Kodir. A. (2016). *Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa dan Perlawanan*. Jurnal Politik. Vol 1. No 2.
- Syarifah (2006), *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Jakarta: Penerbit Yayasan Kota Kita.
- Tong, R. (2006). *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.